

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Partai politik memiliki peran penting dalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia. Alan Ware menyatakan bahwa eksistensi partai politik pada sebuah negara demokrasi menjadi indikator bagi terselenggaranya kekuasaan politik yang mengakui keberadaan rakyat dalam menjalankan suatu pemerintahan (Gatara, 2017). Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk turut berpartisipasi dalam kehidupan bernegara, setiap warga negara memiliki kebebasan untuk berpendapat dan menyatakan kepentingannya. Namun, pada umumnya setiap warga negara memiliki aspirasi, sikap, dan kepentingan yang berbeda, masing-masing perbedaan ini kemudian bersatu dan diakomodasi dalam berbagai partai politik (Kadir, 2014).

Budiardjo (2008) menyatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok teroganisir yang beranggotakan orang-orang dengan orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Kelompok ini memiliki tujuan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan politik secara konstitusional melalui pemilihan umum. Sigmund Neumann menyatakan bahwa partai politik adalah sebuah organisasi dari para aktivis politik yang berupaya untuk dapat menguasai pemerintahan dan merebut dukungan rakyat melalui sebuah kontestasi dengan golongan lain yang memiliki pandangan berbeda (Gatara, 2017). Pada dasarnya partai politik menjadi sebuah medium bagi setiap kelompok masyarakat untuk dapat berpartisipasi dan memperoleh tujuan mereka dengan cara mempengaruhi kekuasaan melalui cara konstitusional seperti pemilihan umum.

Dalam sebuah negara demokrasi, kehidupan berpolitik sangat sulit dipisahkan dari partai politik. Hal ini dapat dilihat dari ungkapan Alan Ware yang mengatakan bahwa dimana ada pembicaraan dan aktivitas politik maka disitu ada partai politik (Gatara, 2017). Menurut *Netherlands Institute for Multiparty Democracy* (NIMD) ada tiga dasar yang menunjukkan peran partai politik dalam berjalannya demokrasi. *Pertama*, partai politik merupakan wadah utama bagi perwakilan politik. *Kedua*, partai politik merupakan prosedur utama dalam

penyelenggaraan pemerintahan. *Ketiga*, partai politik merupakan perantara utama untuk menjaga akuntabilitas demokrasi (Romli, 2008).

Derajat kualitas demokrasi sebuah negara ditentukan oleh derajat kualitas partai politik yang ada di negara tersebut. Partai politik yang berkualitas memiliki keterikatan dengan proses pelebagaan. Oleh karena itu, mempelajari dengan cermat proses pelebagaan sebuah partai politik merupakan upaya bagi menghasilkan negara demokrasi yang berkualitas. Menurut Samuel P. Huntington pelebagaan merupakan suatu proses sebuah organisasi dan prosedur memperoleh nilai dan stabilitas (Ridha, 2016). Partai politik dinyatakan sudah terlebaga dengan baik apabila telah berhasil menginternalisasikan nilai-nilai organisasionalnya sehingga terwujudnya stabilitas internal. Ilmuwan lain yang mengemukakan teori pelebagaan partai politik adalah Levitsky, ia menekankan *value infusion* yaitu ideologi dan nilai-nilai yang disepakati bersama. Hal ini akan mendasari setiap kebijakan dan dukungan partai yang merupakan orientasi politik yang sesuai dengan ideologi partai tersebut (Randall & Svåsand, 2002).

Pelebagaan partai politik berkaitan dengan pelebagaan sistem kepartaian yang dicetuskan oleh Mainwaring dan Scully. Menurut mereka sistem kepartaian memiliki empat dimensi. *Pertama*, stabilitas yang cukup besar dalam kontestasi partai, kontestasi yang disertai dengan pelebagaan akan mengurangi angka volatilitas. *Kedua*, dalam sistem yang melebaga partai memiliki akar yang kuat di masyarakat. Partai memiliki basis utama pendukung yang tidak berubah setiap pemilihan umum dan memiliki struktur yang mengikat. *Ketiga*, aktor politik menyesuaikan legitimasi partai, para aktor melihat partai sebagai unsur penting dalam demokrasi. *Keempat*, adanya status independen partai politik, artinya partai tidak menjadi instrument pribadi seorang pemimpin atau oligarki partai (*personalistic*) (Katz & Crotty, 2018).

Randall & Svåsand (2002) mengemukakan teori yang dapat merangkum keseluruhan aspek pelebagaan partai politik yang dikemukakan oleh beberapa ahli sebelumnya. Menurut mereka terdapat dua aspek dalam proses pelebagaan politik yaitu aspek internal-eksternal dan aspek struktural-*attitudinal*. Kedua aspek ini kemudian menghasilkan empat dimensi pelebagaan yaitu derajat kesisteman

(*systemness*), derajat infusi nilai (*value infusion*), derajat otonomi partai dalam pembuatan keputusan (*decisional autonomy*), dan pengetahuan publik (*citra reification*).

Partai politik menjadi semakin kokoh apabila ia mampu melembagakan dukungan masyarakat. Kokohnya partai politik berimplikasi kepada terwujudnya pelembagaan sistem kepartaian yang berdampak langsung terhadap proses demokratisasi. Sejak lengsernya kepemimpinan Orde Baru, perkembangan partai politik menjadi sangat banyak karena adanya sistem multipartai yang didukung dengan terbitnya Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik. Di era reformasi ini implementasi demokrasi menjadikan partai politik memiliki peran penting dalam sistem politik Indonesia. Melalui partai politik jabatan-jabatan publik diisi baik parlemen, presiden dan wakil presiden, pemerintah daerah hingga kabinet pemerintah.

Banyaknya partai yang muncul sejak awal era Reformasi melahirkan beberapa permasalahan utam bagi partai politik. Bukan hanya permasalahan tingginya persaingan antar partai namun biasanya ideologi yang dianut suatu partai politik. Ideologi merupakan sebuah identitas partai dimana ideologi menjadi sebuah pembeda antara suatu partai dengan partai yang lain. Ideologi juga merupakan dasar bagi perumusan sebuah kebijakan atau *platform* partai politik. Biasanya ideologi partai politik akan berimplikasi pada identifikasi partai yang lemah (Romli, 2021). Hal ini menandakan tidak adanya hubungan yang terjalin antara masyarakat dengan suatu partai, sehingga berdampak kepada loyalitas dan kesetiaan pemilih.

Hubungan yang lemah ini yang menjadi salah satu permasalahan pelembagaan partai politik di Indonesia. Hal ini berdampak pada tingginya volatilitas pemilu, survey yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada Oktober 2021 menunjukkan bahwa angka volatilitas pemilu yang cenderung tinggi pada pemilu 2014-2019 yakni sebesar 13,5%. Faktor terjadinya fluktuasi pada elektabilitas parpol disebabkan oleh adanya penyebaran suara pada setiap pemilu. Terdapat tiga faktor utama yang menjadi pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihan partai yaitu ideologi dan nilai-nilai partai sebesar 84,9%, visi misi partai sebesar 84,3%, dan program kerja partai sebesar 84,0% (Nurhasim, 2021).

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan memperkuat pelebagaan partai politik. Untuk dapat menanamkan akar yang kuat di masyarakat partai politik harus mampu melembagakan dukungan masyarakat. Dua aspek penting yang berkaitan dengan pelebagaan dukungan masyarakat dalam teori pelebagaan partai politik Randall & Svåsand (2002) adalah kedua aspek *attitudinal* yaitu dimensi *value infusion* dan *reification*. *Value infusion* berkaitan dengan hubungan sumber vital kohesi partai dengan kelompok populis, dimana partai memiliki dukungan berdasarkan kelas, agama, maupun etnis. *Reification* merupakan derajat pengetahuan publik terhadap kiprah suatu partai politik (citra).

Proses penanaman *value infusion* dapat dilakukan melalui penerjemahan ideologi atau asas partai menjadi platform, kebijakan, dan program-program partai. Sebuah partai yang melembaga akan menjadikan asas atau ideologinya sebagai sumber kohesi partai. Asas dijadikan landasan oleh partai politik dalam merumuskan sebuah platform, kebijakan, dan program, serta menjadi pedoman bagi para kadernya dalam berperilaku. Sehingga ideologi dapat membangun budaya dan *positioning* sebuah partai. Dengan begitu, partai akan memperoleh identifikasi di masyarakat dan memperoleh dukungan. Masyarakat akan memberikan dukungan kepada partai politik yang identik dengan karakteristiknya.

Sedangkan *reification* dapat dilakukan melalui proses komunikasi politik. Menurut Firmanzah (2007) komunikasi politik dimaknai sebagai sebuah proses interaksi dialogis yang dilakukan oleh partai politik mengenai seluruh aktivitas politik yang sedang bahkan akan dilakukan. Sedangkan menurut Subiakto & Ida (2014) komunikasi politik merupakan sebuah komunikasi yang memiliki sebuah konsekuensi aktual dan potensial terhadap suatu sistem politik. Lebih lanjut Firmanzah (2007) menjelaskan bahwa interaksi dialogis dalam proses komunikasi politik dapat membangun persamaan persepsi antara masyarakat luas dengan partai politik. Hal ini akan berpengaruh terhadap identifikasi partai yang menurut Kavanagh merupakan hubungan psikologis antara seseorang dengan partai politik (Romli, 2021).

Proses komunikasi partai politik dapat dilakukan melalui kegiatan kehumasan politik. Salah satu fokus kehumasan politik adalah untuk mengetahui kebutuhan dan tuntutan media modern dan memaksimalkan akses partai politik ke dalam media bebas (McNair, 2018). Salah satu media komunikasi yang paling populer saat ini adalah media baru. Berbeda dengan media konvensional, perkembangan teknologi baru yang ada pada media baru menjadikan distribusi informasi menjadi lebih terbuka. Luik, (2020) menjelaskan bahwa karakteristik media baru yang interaktif dan digital telah menghadirkan sebuah budaya baru dalam masyarakat. Dalam media baru masyarakat berperan sebagai *user* atau pengguna, dimana masyarakat memiliki kontrol terhadap konten dan berbagai informasi yang ada.

Salah satu aplikasi media baru yang ada saat ini adalah media sosial. Hingga saat ini media sosial dianggap sebagai medium komunikasi yang populer dan memiliki banyak pengguna. Kepopuleran media sosial didorong dengan adanya kemudahan akses internet. Dalam penelitian yang dilakukan oleh *We Are Social* jumlah pengguna internet di Indonesia sendiri mengalami peningkatan. Kemp (2022) menerangkan data dan tren pengguna internet di Indonesia pada Januari 2022 mencapai 204,7 juta pengguna, sekitar 73,7% dari total jumlah penduduk. Tren ini mengalami kenaikan sebesar 1% dari tahun sebelumnya. Masyarakat menggunakan internet untuk berbagai macam aktivitas, salah satunya adalah mengakses media sosial. Jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai 191,4 juta pengguna atau sebanyak 68,9% dari total jumlah penduduk. Masyarakat Indonesia rata-rata mengakses internet selama 8 jam 36 menit dalam sehari, dengan 3 jam 17 menit untuk mengakses media sosial.

Instagram menjadi salah satu alternatif media sosial yang digunakan oleh beberapa partai politik di Indonesia. Karakteristik Instagram yang mengintegrasikan *text*, audio, dan visual menjadikan Instagram sebagai media yang baik untuk komunikasi politik. Menurut Luik (2020) Instagram tidak hanya mewadahi para penggunanya untuk berkomunikasi, tapi ada upaya konstruksi identitas para pengguna yang ditunjukkan melalui presentasi diri.

Upaya menjadikan media sosial Instagram sebagai sarana komunikasi politik merupakan langkah yang menjanjikan. Seperti dilansir *napoleoncat* Instagram memiliki jumlah pengguna sebanyak 104,2 juta pengguna 37,4% dari seluruh populasi yang ada. Dengan pengguna berusia 18-24 tahun menjadi mayoritas.

**Gambar 1.1 Data Pengguna Instagram di Indonesia Tahun 2022**



(Sumber: *napoleoncat.com*)

Data ini berimplikasi pada mayoritas pengguna internet yang merupakan pemilih pemula. Selaras dengan itu Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu penyelenggara pemilu dalam proses pematakhiran data jumlah pemilih hingga juni 2022 menyatakan ada sekitar 428.799 pemilih pemula (Dirgantara, 2022). Selanjutnya menurut Widi (2022) gen z dan milenial dengan rentang usia 17-39 tahun memiliki presentase mendekati 60% dalam total jumlah pemilih dalam skala nasional.

PKS Kota Bandung menjadi salah satu partai politik yang menggunakan media sosial Instagram sebagai salah satu media komunikasi politiknya. Pada Tanggal 21 November 2022 akun *@pksbandung* memiliki pengikut sebanyak 16.600 dengan jumlah unggahan sebanyak 3.825. Pengelolaan akun Instagram ini merupakan langkah strategis, karena dari total 2,5 juta penduduk kota bandung sebanyak 2,1 juta merupakan pengguna internet atau sekitar 85% dari total jumlah

penduduk. Media sosial juga menjadi salah satu rujukan utama masyarakat Kota Bandung dalam mencari Informasi. Selain itu menurut data yang rilis oleh ketua KPU Kota Bandung menunjukkan bahwasanya hampir sebanyak 40% pemilih yang terdaftar merupakan pemilih milenial (Dwi, 2022).

Performa PKS di pilkada Kota Bandung patut diperhitungkan. Pada pemilihan legislatif tahun 2019 berdasarkan perhitungan suara rapat pleno KPU Kota Bandung PKS memperoleh suara sebanyak 295.615, PKS unggul dari PDIP dan Gerindra yang masing-masing memperoleh suara sebanyak 226.588 dan 204.717 suara. Melalui perolehan tersebut PKS menguasai eksekutif dan legislatif di Kota Bandung. Hal ini diketahui karena Wali Kota Bandung pada saat itu adalah Oded M. Danial yang merupakan kader PKS yang diusung pada Pilwalkot 2018 (Ramadhan, 2019).

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwasanya keberhasilan PKS Kota Bandung dalam meraih kemenangan pada Pilwalkot 2018 dan Pileg 2019 menunjukkan bahwa PKS telah berhasil memperoleh dukungan masyarakat. Perolehan dukungan ini tidak bisa dilepaskan dari dimensi *value infusion* dan *reification* Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandung, salah satunya melalui media komunikasi mereka yaitu media sosial instagram. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis penerapan dimensi *value infusion* dan *reification* Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandung melalui media sosial instagram, yang dituangkan dalam penelitian dengan judul “PELEMBAGAAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KOTA BANDUNG (Studi Kasus Dimensi *Value Infusion* dan *Reification* PKS Kota Bandung Melalui Media Sosial Instagram)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah maka rumusan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dimensi *value infusion* dalam pelebagaan Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandung?
2. Bagaimana dimensi *reification* Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandung melalui media sosial instagram?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dimensi *value infusion* dalam pelebagaan Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandung.
2. Mengetahui penerapan dimensi *reification* Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandung melalui media sosial instagram.

### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah peneliti jelaskan di atas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi Peneliti
    - 1) Hasil penelitian dapat dijadikan inspirasi untuk melakukan penelitian pada berbagai kajian dalam bidang politik dan penelitian pada masalah serupa dengan lebih mendalam
    - 2) Penelitian ini dapat menjadi referesni untuk penelitian terkait pelebagaan partai politik dengan menggunakan media sosial Instagram atau media sosial lainnya.
  - b. Bagi Partai Politik
    - 1) Hasil ini dapat memberi informasi kepada partai politik untuk mengevaluasi derajat *value infusion* dan *reification* dalam pelebagaan partai politik.
2. Manfaat Praktis
  - a. Masyarakat
    - 1) Mampu menjadi pembelajaran untuk memahami pelebagaan partai politik.
    - 2) Mampu menelaah secara kritis terkait dimensi *value infusion* dan *reification* dalam proses pelebagaan partai politik.



## E. Kerangka Berpikir

Sebagai salah satu unsur penting dalam sebuah negara demokrasi, partai politik harus melakukan pelebagaan yang kuat. Menurut Huntington partai politik dinyatakan sudah terlembaga dengan baik apabila telah berhasil menginternalisasikan nilai-nilai organisasionalnya sehingga terwujudnya stabilitas internal (Romli, 2021). Salah satu aspek penting bagi partai politik adalah pelebagaan dukungan massa. Randall & Svåsand (2002) mengemukakan sebuah teori pelebagaan partai politik, yaitu pelebagaan partai dapat dilihat dari dua aspek yaitu internal-eksternal dan *structural-attitudinal*. Kedua aspek tersebut kemudian menghasilkan empat dimensi yaitu *systemness*, *value infusion*, *autonomy*, dan *reification*. Kedua dimensi *attitudinal* yaitu *value infusion* dan *reification* berperan penting bagi proses pelebagaan dukungan massa.

*Value infusion* berhubungan dengan hubungan partai dengan masyarakat populis memberikan dukungan atas dasar kesamaan kelas, agama, dan etnis. *Reification* merupakan sebuah resonansi partai politik yang merupakan derajat pengetahuan masyarakat terhadap eksistensi dan sepak terjang partai politik (citra). Kedua dimensi ini dapat diwujudkan melalui proses komunikasi politik. Melalui kehumasan partai proses komunikasi politik dapat dijalin melalui sebuah media. Salah satu media komunikasi populer saat ini adalah media sosial instagram. Hal ini dapat dimanfaatkan PKS Kota Bandung untuk menggunakan media sosial sebagai sarana pelebagaan dukungan massa.

